

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tuntutan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel semakin menguat seiring dengan dinamika reformasi birokrasi yang terus bergulir di Indonesia. Di Indonesia, akuntabilitas publik dan tata kelola yang baik menjadi perhatian utama sebagai langkah untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta manajemen pemerintah yang efektif. Kedua konsep ini saling berhubungan, di mana sistem akuntabilitas publik merupakan salah satu elemen kunci dalam mewujudkan tata kelola yang baik. Melalui penerapan sistem akuntabilitas publik yang efisien, pemerintah dan lembaga publik dapat lebih mudah menjelaskan tindakan dan keputusan mereka kepada masyarakat yang dilayani, sehingga mampu membangun kepercayaan dan kredibilitas di hadapan public (Maolani et al., 2023). Keadaan ini menjadikan akuntabilitas kinerja tidak hanya sebagai tanggung jawab administratif, tetapi juga sebagai fondasi utama kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah (Siahaan & Fachruzzaman, 2025).

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dibuat agar melihat integrasi antara perencanaan strategis, pengukuran kinerja, dan akuntabilitas organisasi melalui cara pengukuran hasil/output yang dicapai. Jika SAKIP berfungsi dengan efektif, sebuah lembaga pemerintah dapat menampilkan tingkat akuntabilitas yang tinggi kepada masyarakat melalui laporan kinerja yang valid dan berkualitas. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah produk dari SAKIP, berisi data mengenai target kinerja, realisasi pencapaian, masalah pelaksanaan, serta strategi yang telah direalisasikan dan direncanakan. Karena itu,

mutu LAKIP sangat ditentukan oleh sistem evaluasi yang digunakan oleh lembaga pemerintah, termasuk evaluasi internal yang menjamin keselarasan antara data, indikator, dan hasil kinerja yang dilaporkan (Yusrianti & Safitri, 2015)

Peran evaluasi kian krusial dalam menghadapi tuntutan reformasi birokrasi dan peningkatan mutu pelayanan publik di Indonesia. Evaluasi LAKIP di pemerintah daerah menunjukkan bahwa mutu evaluasi memiliki dampak langsung terhadap ketepatan dan keandalan laporan kinerja yang dihasilkan. Evaluasi LAKIP yang efektif dapat mengidentifikasi kesenjangan antara rencana dan pelaksanaan program, menetapkan penyebab rendahnya pencapaian target, serta memberikan saran perbaikan yang strategis. Namun, penelitian itu juga menunjukkan bahwa metode evaluasi yang tidak memadai dapat membuat informasi kinerja yang disajikan kurang mencerminkan keadaan sebenarnya di lapangan, sehingga berdampak pada kualitas akuntabilitas organisasi (Stefan et al., 2023)

Dalam lingkup lembaga pengawasan internal pemerintah, evaluasi LAKIP memiliki sifat dan kompleksitas yang agak berbeda. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berperan ganda sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP): mengawasi entitas lain dan juga menyusun serta mengevaluasi LAKIP untuk dirinya sendiri sebagai lembaga pemerintah. Peran ini memerlukan prosedur evaluasi internal yang sistematis dan terstandar sehingga LAKIP yang dihasilkan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat menggambarkan tingkat pertanggungjawaban kinerja yang bebas dari pengaruh bias (Artinya laporan dan evaluasi tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu) dan kesalahan internal (Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, 2021).

Evaluasi kinerja di instansi pemerintah perlu didukung oleh prosedur yang terarah dan sistematis agar dapat menciptakan informasi yang memiliki tingkat akuntabilitas tinggi serta menunjukkan hasil kinerja secara objektif. Tugas akhir ini menekankan signifikansi mekanisme evaluasi sebagai proses strategis yang mencakup penilaian terhadap efektivitas indikator kinerja, kesesuaian data pendukung, serta peran koordinasi antarunit kerja dalam merumuskan LAKIP. Tanpa adanya prosedur yang standar, kualitas evaluasi LAKIP dapat mengalami penyimpangan, sehingga laporan akhir tidak mencerminkan dengan tepat realitas kinerja organisasi (Siahaan & Fachruzzaman, 2025)

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat bertugas untuk memastikan bahwa setiap tahap evaluasi LAKIP, mulai dari perencanaan evaluasi, pengumpulan data, penilaian indikator, hingga penyusunan rekomendasi dilakukan berdasarkan standar internal dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Hal ini perlu dianalisis secara mendetail karena evaluasi LAKIP tidak hanya berhubungan dengan aspek administratif, tetapi juga berhubungan dengan budaya kinerja yang berorientasi pada hasil. Evaluasi yang efektif akan menghasilkan saran perbaikan yang berarti untuk memperkuat tata kelola organisasi serta meningkatkan mutu akuntabilitas public.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dikatakan bahwa prosedur evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat harus sesuai peraturan PerMenPANRB Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Lampiran VIII Keputusan Sekretaris Utama BPKP Nomor KEP-210/SU/01/2022 tentang Prosedur Baku Fungsi Manajemen Kinerja dalam Peta Proses Bisnis di Lingkungan BPK. Dalam tugas akhir ini, prosedur evaluasi Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) menjadi salah satu hal penting yang dikaji secara komprehensif.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah Berdasarkan penjelasan pada latar belakang tersebut yaitu Bagaimana Prosedur pelaksanaan evaluasi Laporan pertanggungjawaban Kinerja Instansi Pemerintah pada Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat. Untuk melihat bagaimana secara khusus prosedur pelaksanaan evaluasi LAKIP kita juga harus melihat komponen penting, yaitu:

1. pejabat yang Memiliki Kewenangan dalam pelaksanaan evaluasi LAKIP
2. Kelengkapan yang di butuhkan dalam pelaksanaan evaluasi LAKIP
3. Mekanisme pelaksanaan evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat.

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari Tugas Akhir ini yang penulis lakukan adalah untuk memahami bagaimana Prosedur dari pelaksanaan evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat. Dan juga bisa memahami komponen yang lebih detail dari pelaksanaan evaluasi LAKIP, yaitu:

1. Memahami siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan evaluasi LAKIP
2. Memahami apa saja kelengkapan yang di butuhkan dalam pelaksanaan evaluasi LAKIP
3. Memahami mekanisme pelaksanaan evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat.

1.4 Manfaat Penulisan

1. Bagi Penulis

- Menambah pemahaman kegiatan dan cara kerja yang dilakukan di kantor BPKP pada umumnya
- Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Studi Perbankan dan Keuangan, Departemen Vokasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Andalas.
- Memperluas pandangan dan peningkatan pemahaman terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
- Mengatasi pertanyaan-pertanyaan ketidaktahuan penulis mengenai prosedur evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perwakilan Badan Pemeriksaan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Barat.

2. Bagi Universitas Andalas

Menambah referensi kepustakaan dan bahan bacaan bagi mahasiswa yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber kajian ilmiah, khususnya mengenai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Barat.

3. Bagi Instansi atau Perusahaan

Sebagai sumber informasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Barat serta diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam pelaksanaan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

1.5 Metode Penulisan

Metode penulisan yang cocok untuk Prosedur Evaluasi LAKIP Pada Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Barat tersebut adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan analisis kebijakan. Pendekatan ini cocok karena fokusnya adalah memahami secara mendalam proses prosedur, dan perkembangan dalam penerapan sistem pengawasan intern, khususnya dalam SAKIP pada BPKP Provinsi Sumatera Barat.

Jadi, jenis pengumpulan data yang menggunakan metode penelitian kualitatif untuk Tahapan dalam pelaksanaan evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Barat meliputi:

1. Wawancara

Wawancara mendalam dilakukan terhadap pejabat yang terlibat dalam proses evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Melalui teknik ini, informasi yang diperlukan dapat diperoleh yang lebih rinci mengenai tahapan evaluasi, mekanisme pelaksanaan, kendala yang dihadapi, serta cara penyelesaian yang diterapkan dalam kegiatan evaluasi LAKIP di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat.

2. Observasi

Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai pelaksanaan evaluasi LAKIP. Melalui observasi, peneliti dapat memperoleh informasi faktual mengenai pelaksanaan evaluasi diterapkan, bagaimana alur kerja berjalan, serta bagaimana interaksi antarpegawai dalam mendukung kegiatan evaluasi tersebut.

3. Dokumentasi

pengumpulan data melalui dokumentasi dilakukan dengan menghimpun dan mengkaji berbagai dokumen yang berkaitan dengan evaluasi LAKIP, seperti pedoman atau standar evaluasi, laporan hasil evaluasi, dokumen pendukung kinerja, serta arsip administrasi lainnya. Teknik dokumentasi digunakan sebagai upaya untuk mendukung data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi sehingga informasi yang dihasilkan lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

1.6 Tempat Dan Waktu Magang

Untuk Kegiatan magang dilaksanakan pada salah satu instansi pemerintah, yaitu Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Barat, selama 40 (empat puluh) hari kerja.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan laporan magang disusun dengan memiliki lima bab. Setiap bab disusun dalam beberapa subbab yang saling berhubungan sehingga membentuk pembahasan yang utuh satu kesatuan pembahasan guna memberikan pemahaman yang utuh mengenai permasalahan yang dikaji. Adapun rincian sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan magang, manfaat magang, metode pelaksanaan magang, tempat dan waktu pelaksanaan magang, serta sistematika penyusunan laporan magang.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini memuat landasan teori yang menjelaskan konsep-konsep yang berkaitan dengan objek penelitian serta berbagai aspek yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.

BAB III GAMBARAN UMUM

Bab ini memuat gambaran umum instansi yang meliputi struktur organisasi, pembagian tugas, serta bidang kerja yang menjadi ruang lingkup pelaksanaan kegiatan.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian beserta pembahasannya berdasarkan data yang telah diperoleh.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi penutup yang mencakup kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang ditujukan sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya dalam rangka menyempurnakan dan mengembangkan penelitian yang akan datang.

